

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
(KOTA MALANG DAN KABUPATEN MALANG)**

Mardhani Susilawati * Anik Malikh, dan M. Cholid Mawardi*****

Universitas Islam Malang

Email: Mardanisusila@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to analyze “the influence of the presentation of regional financial statements and the accessibility of regional financial statements on the transparency and accountability of regional financial management in Malang City and Malang Regency”. The sample in this study were active employees of the Malang city and district government as users of financial reports presented by local governments, in accordance with applicable laws and regulations. The municipal government employees who are the respondents are the Budget and Treasury Division, Accounting and Regional Asset Management Division and Regional Asset Utilization Division and have worked for more than 1 year. The analytical method used is Multiple Linear Regression with SPSS 22 Software For Windows. Based on the results of the hypothesis test that simultaneously Presentation of Regional Financial Statements and Accessibility of Regional Financial Statements have a positive and significant effect on Transparency & Accountability of Regional Financial Management in Malang City and Malang Regency. Partially, it shows that the Presentation of Regional Financial Statements and Accessibility of Regional Financial Statements have a positive and significant effect on Transparency & Accountability of Regional Financial Management in Malang City and Malang Regency.

Keywords: *Presentation of Regional Financial Reports, Accessibility of Regional Financial Reports, Transparency & Accountability of Regional Financial Management*

PENDAHULUAN

Periode globalisasi saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh seluruh komunitas internasional. Sebagai anggota masyarakat global, Indonesia berkewajiban untuk berperan aktif dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi, keterlibatan, dan akuntabilitas merupakan tiga ciri pemerintahan yang baik.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah di Indonesia semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. berdasarkan asas dan kewajiban ekonomi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Kedua undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.

Pada awal otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah lebih mandiri dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan di berbagai daerahnya. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, Kota Malang dan Kabupaten Malang telah mengemban tugas untuk memberikan inovasi dalam sistem pemerintahan agar lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya, yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat sebagai serta masyarakat Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Laporan keuangan disiapkan untuk memberikan informasi yang relevan tentang situasi keuangan entitas pelapor dan semua transaksi yang terjadi selama periode pelaporan.

Penyesuaian signifikan telah dilakukan pada undang-undang yang mengatur akuntabilitas sektor publik, dengan penekanan pada fungsi sistem akuntansi di dalam memantau serta meninjau kinerja keuangan dan layanan. Pergeseran dari single entry ke double entry dalam akuntansi pemerintah daerah adalah salah satu yang revolusioner. Di sisi lain, untuk daerah tertentu, publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di berbagai media cetak dan elektronik belum menjadi standar. Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menambahkan satu ayat, yaitu ayat 4a yang berbunyi: “Untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah”.

Berdasarkan uraian diatas objek dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Daerah (Kota Malang dan Kabupaten Malang)”, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Kota Malang dan Kabupaten Malang)”**

Rumusan Masalah

Bagaimana Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Kota Malang dan Kabupaten Malang)?.

Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Kota Malang dan Kabupaten Malang).

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selajutnya untuk menambah pengetahuan dalam hal penelitian tentang laporan keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kabupaten Malang Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau informasi sebagai acuan dalam mempertimbangkan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam penyajian laporan keuangan daerah.
- b. Bagi Masyarakat dan Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dan Mahasiswa tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

KERANGKA TEORITIS & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Supriyono (2018:63), konsep teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. *Agency theory* menjelaskan adanya benturan kepentingan (konflik) antara *principal* dan *agent*, disini yang disebut *agent* adalah pemerintah daerah Kota Malang dan Kabupaten Malang dan *principal* adalah pengguna eksternal laporan keuangan daerah Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan terorganisir yang merinci situasi dan transaksi keuangan entitas pelapor. Catatan keuangan entitas sektor publik memainkan peran penting dalam membangun akuntabilitas sektor publik. Tuntutan penerapan akuntabilitas publik yang semakin meningkat berdampak pada kemampuan manajemen sektor publik dalam menyampaikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Mardiasmo (2018:30).

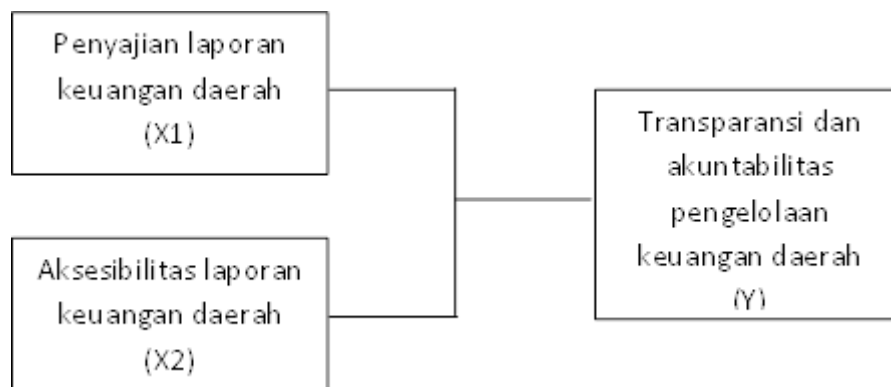
Aksesibilitas Laporan Keuangan

Kemudahan seseorang dalam menerima informasi mengenai rekening keuangan disebut sebagai aksesibilitas laporan keuangan (Fauziyah, 2017:4). Menurut Mostofa (2012:3), aksesibilitas diartikan sebagai proses penerbitan laporan keuangan untuk konsumsi publik. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berkaitan dengan kemudahan akses informasi laporan keuangan.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan syarat bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara terbuka dan jujur kepada masyarakat melalui media.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

- H1: Terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- H1a: Terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- H1b: Terdapat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian kuantitatif berdasarkan jenis data yang diteliti. Pendekatan kuantitatif untuk penelitian adalah pendekatan yang berfokus pada data numerik (angka) yang dianalisis menggunakan prosedur statistik. Azwar (2010:5).

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kausal komparatif. Studi kausal komparatif merupakan penelitian dengan gaya *ex post facto*, artinya didasarkan pada data yang diperoleh setelah suatu fakta atau peristiwa terjadi. Peneliti dapat mengidentifikasi variabel yang dipengaruhi (variabel terikat) dan melakukan penelitian terhadap variabel yang mempengaruhi (variabel bebas).

Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan frasa luas yang mengacu pada item atau subjek yang memiliki fitur dan karakteristik tertentu. Objek atau topik dipilih oleh akademisi yang melakukan studi dan menghasilkan hasil. Populasi di dalam penelitian ini yaitu pengguna eksternal laporan keuangan Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang.

2. Sampel

Purposive sampling digunakan dalam prosedur pemilihan sampel, artinya sampel dipilih berdasarkan faktor-faktor yang relevan dengan tujuan penelitian. Berikut merupakan kriteria sampel pada penelitian ini : Pegawai aktif Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang bagian Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Penata Usahaan Aset Daerah dan Bidang Pemanfaatan Aset Daerah serta telah bekerja lebih dari 1 tahun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sampel Penelitian

Pengguna eksternal laporan keuangan (pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan) Pemerintah Kota Malang dan Kabupaten Malang digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini. Diketahui total pegawai Pemerintah Kota Malang sebanyak 51 orang dan yang sesuai kriteria sampel sebanyak 35 orang, total pegawai Pemerintah Kabupaten Malang sebanyak 172 orang dan yang sesuai kriteria sampel 115 orang . Pada penelitian ini tidak menggunakan seluruh populasi yang ada, tetapi hanya mengambil sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria. Demikian perhitungan sampel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar	223
Jumlah kuesioner yang tidak terjawab	(50)
Jumlah kuesioner yang terjawab	150
Jumlah Sampel	150

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Hasil Statistik deskriptif pada variabel penelitian ini yaitu:

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PLKD	150	1,00	5,00	3,1200	1,08014
ALKD	150	1,00	5,00	2,3733	1,16173
TAPKD	150	1,00	5,00	2,8733	1,24941
Valid N (listwise)	150				

Sumber: Output SPSS, 2021

Hasil Uji Normalitas

Jika asumsi normalitas dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PLKD	ALKD	TAPKD
N		150	150	150
Normal Parameters(a,b)	Mean	14,0800	10,9200	20,1133
	Std. Deviation	3,09691	3,09691	2,89535
Most Extreme Differences	Absolute	,227	,191	,086
	Positive	,227	,191	,086
	Negative	-,099	-,144	-,071
Kolmogorov-Smirnov Z		1,265	1,061	1,058
Asymp. Sig. (2-tailed)		,082	,211	,213

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Sumber: Output SPSS, 2021

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Simultan

Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	305,539	2	152,770	23,801	,000(a)
	Residual	943,534	147	6,419		
	Total	1249,073	149			

a Predictors: (Constant), ALKD, PLKD

b Dependent Variable: TAPKD

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 nilai Fhitung (23,801) memiliki nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari (0,05), maka H0 ditolak dan H1 disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasilnya, hipotesis ketiga telah dikonfirmasi dan diterima. Penelitian Mulyana (2016) telah didukung oleh temuan investigasi ini.

2. Koefisien Determinasi

Adapun hasil uji determinasi (*Adjusted R Square*) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi
 Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,495(a)	,245	,234	2,53350

a Predictors: (Constant), ALKD, PLKD

Sumber: Output SPSS, 2021

Dengan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,234. Hasil tersebut menjelaskan sumbangan atau kontribusi dari variabel-variabel bebas (Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah) yang disertakan dalam persamaan regresi terhadap variabel tetap (Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah sebesar 23,4%, sedangkan 76,6% disumbangkan oleh variabel lain.

Uji Parsial

Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,877	,973		14,263	,000
	PLKD	,234	,092	,250	2,540	,012
	ALKD	,269	,092	,288	2,921	,004

a Dependent Variable: TAPKD

Sumber: Output SPSS, 2021

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Variabel tersebut memiliki nilai uji-t sebesar 2.540 dan signifikansi sebesar 0,012 yang keduanya lebih kecil dari (0,05). menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa variabel X1 berpengaruh positif dan substansial terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin terbuka dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah, semakin baik penyajian neraca keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang

berlaku umum. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, maka semakin besar pula konsekuensi pencapaian tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. Hasilnya, hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh peningkatan penyajian laporan keuangan daerah. Temuan penelitian ini konsisten dengan Solimi (2015)

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Variabel X2 memiliki nilai uji-t sebesar 2,921 dan signifikansi 0,004 lebih kecil dari variabel X1 (0,05). menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima, yang berarti variabel tersebut berpengaruh positif dan substansial terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, maka semakin besar pula Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah. Untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus menyediakan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Mulyana (2016).

SIMPULAN, KETERBATAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel-variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keterbatasan

1. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kendala penelitian berbasis kuesioner adalah tidak dapat memberikan informasi yang lebih rinci daripada yang dapat diperoleh dari masing-masing responden.
2. Variabel di dalam penelitian ini hanya menggunakan Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah sebagai variabel independen; serta satu variabel dependen yaitu Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode survei melalui kuesioner yang ditambah dengan teknik wawancara secara langsung.
2. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan lebih banyak faktor sebagai variabel independen yang terkait dengan Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, seperti Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Asbi 2017. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar”. *Jurnal Akuntansi* Vol.2 No. 1, Oktober 2017.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Deponegoro.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2014. *Buletin Teknis No. 18 tentang Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berbasis Akrua*. Jakarta
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mulyana Budi. 2016. “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No. 1, Mei 2016.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2002 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Rochman Abdul. 2010. “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang.
- Solimi. Hehanussa J. 2015. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon”. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No. 1, Mei 2015.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyono, R. A. (2018). Akuntansi keprilakuan. Gajah Mada University Press.

*) **Maharani Susilawati** adalah alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

***) **Anik Malifah** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

****) **M. Cholid Mawardi** adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang